

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta.
- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Busyra Azheri, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara : Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet.III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.

Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Suharso da Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No, 4 Tahun 2009*, Cet. I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

W.J.S, Poerwodarminto, 1952, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **Jurnal :**

Bahder Johan Nasution, “Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 48, No. 1, Tahun 2014.

Bambang Sujatmiko, “Penambangan Emas Tanpa Izin Di Daerah Aliran Sungai (Das) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan*, Volume 4, No. 1, Tahun 2012.

- Danny Z . Herman, “Pertambangan Tanpa Izin (Peti) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 22, No. 1, Tahun 2011.
- Helza Nova Lita, “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 10, No. 3, Tahun 2013.
- Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 15, No. 2, Tahun 2013.
- Marhaeni Ria Siombo, “Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No. 3, Tahun 2014.
- Rakyat di Kecamatan Kokap Kulon Progo)”, *Jurnal EKOSAINS*, Volume IV, No. 1, Tahun 2012.
- Restu Juniah, “Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon)”, *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Volume 12, No. 2, Tahun 2013.
- Rina Dian, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Illegal/Illegal Mining Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Hukum*, Volume 18, No. 2, Tahun 2013.
- Rininta Larasati Dkk, “Valuasi Ekonomi Eksternalitas Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat Dan Peran Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Merkuri (Studi Kasus Pertambangan Emas

Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, No. 2, Tahun 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

**Internet :**

Barongmr, 14 Desember 2012, *Pengertian Emas*, <https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/12/14/pengertian-emas/>, diakses pada 15 April 2017 Pukul 16.05 WIB.

Hanif Burhani, 23 Juni 2016, *Hasil Pengujian Kandungan Emas PETI di Sarolangun Mengagetkan*, <http://jambi.tribunnews.com/2016/06/23/hasil-pengujian-kandungan-emas-peti-di-sarolangun-mengagetkan>, diakses pada tanggal 15 April 2017 Pukul 17.00 WIB.

Kabar Jambi, 28 Maret 2016, *Hutan Dijarah dan PETI Marak, Enam Desa di Sarolangun Banjir Bandang*, <http://kabarjambi.net/hutan-dijarah-dan-peti-marak-enam-desadi-sarolangun-banjir-bandang/>, diakses pada tanggal 15 April 2017 Pukul 17.45 WIB.

Kerinci Google, 2016, *Kilauan Emas PETI Nestapa Bagi Jambi, Siapa Dibelakangnya?*, <http://www.kerincigoogle.com/2016/01/kilauan-emas-peti-nestapa-bagi-jambi.html>, diakses pada tanggal 8 April 2017 Pukul 14.12 WIB.

KPDE Kabupaten Sarolangun, *Potensi Daerah*, <http://sarolangunkab.go.id/v3/index.php/potensi-daerah/9-potensi-daerah>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 Pukul 14.31 WIB.

Rhizki Okfiandi, *Aktivitas Penambang Emas Ilegal Kembali Memakan Korban*, <https://www.imcnews.id/read/aktivitas-penambang-emas-ilegal-kembali-memakan-korban>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 22.05 WIB.

Robby aneuknangroe, *Teori Penegakan Hukum*, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>

Sari, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya*, <http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>, diakses pada tanggal 24 Juli 2017 pukul 11.00 WIB.